

## Semua Jenderal Bintang 3 di TNI AD Punya Kans Jadi KSAD Gantikan Andika

**JAKARTA (IM)** – Setelah Jenderal TNI Andika Perkasa ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Panglima TNI, kini masyarakat Indonesia bertanya-tanya siapakah yang akan mejabat KSAD. Seperti diketahui Jenderal Andika telah menjalani fit and proper test di Komisi I DPR RI sebagai calon pengganti Panglima TNI.

Pengamat Militer Universitas Paramadina, Dr Anton Aliabbas mengungkapkan, soal pergantian KSAD, siapapun Jenderal TNI AD bintang tiga memiliki kesempatan sama.

“Kalau soal KSAD, semua perwira bintang 3 di TNI AD punya kans sama untuk jadi KSAD,” kata Anton saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (7/11).

Anton tak bisa berbicara panjang mengenai posisi

KSAD tersebut. Yang pasti, kata Anton, nantinya Wanjakti TNI AD akan mengusulkan sejumlah nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait jabatan KSAD.

“Nanti Wanjakti akan mengusulkan kepada Presiden dan Presiden akan memutuskan,” ujar Anton.

Presiden Jokowi mengirimkan surat ke DPR untuk memilih Jenderal TNI Andika menjadi Panglima TNI menggantikan Marsyal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa purna tugas.

Andika pun sudah menjalani Fit and Proper Test di Komisi I. Ia memaparkan sejumlah program kerja ketika nanti resmi menjabat sebagai Panglima TNI. Usai mendengarkan paparan tersebut, Komisi I akhirnya menyetujui Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal pengganti Panglima TNI. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## KOMISI I DPR SETUJUI JENDERAL ANDIKA PERKASA JADI PANGLIMA TNI

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus (kiri) usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11). Komisi I DPR memberikan persetujuan terhadap penunjukan dan pengangkatan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

## Pembangunan Papua Tak akan Jalan jika Keamanan Tidak Terkendali

“Kita ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat juga masyarakat seluruhnya,” ungkap Wapres Ma'ruf Amin.

**JAKARTA (IM)** - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan akselerasi pembangunan di Papua mustahil bisa terwujud apabila dari sisi keamanan masih mengkhawatirkan. Karena itu, Wapres telah memerintahkan kepada jajarannya di sektor keamanan

untuk menggelar rapat koordinasi agar langkah-langkah yang diambil di Papua dapat terintegrasi dengan baik.

“Tetapi betul pembangunan ini tidak akan bisa berjalan kalau kemandirian tidak terkendali, tidak kondusif. Maka dari itu dua hal ini menjadi program

yang terintegrasi,” urai Wapres dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (7/11).

Pemerintah, kata Wapres, terus melakukan sinergi untuk mengakselerasi pembangunan di Papua. Sinergi dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat. Oleh karena itu, untuk terselenggaranya akselerasi yang baik serta hasil maksimal yang dirasakan masyarakat, diperlukan juga sinergi pembangunan baik dari sisi kesejahteraan dan keamanan.

“Karena itu pembangunan di Papua ini harus menghar-

moniskan antara kesejahteraan dan keamanan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan, harmonisasi ini dapat terjadi salah satunya dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat di Papua agar hasil yang dicapai nantinya realistis dan sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat setempat.

“Kita ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, baik masyarakat adat juga masyarakat seluruhnya,” ungkap Wapres.

“Karena itu ketika saya pada waktu menutup PON (Pekan Olahraga Nasional), kemudian saya melakukan rapat koordinasi dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dari kalangan pemuda, kalangan perempuan, berbagai klaster. Local champion dari berbagai klaster kita ajak berdialog untuk menyampaikan (pandangan), dan kita menghimpun

pandangan-pandangan itu untuk kita jadikan program yang nanti realistis,” katanya.

Wapres menyampaikan harapan agar upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah terkait harmonisasi kesejahteraan dan keamanan di Papua dapat sukseskan program akselerasi yang telah dirancang dan menghilangkan ketidakpuasan serta rasa tidak percaya yang mungkin terjadi di Papua terhadap pemerintah.

“Dengan demikian kita berharap ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokoh-tokoh Papua baik tokoh pemerintahan,

tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, ini terus kita lakukan dialog-dialog di dalam rangka menghilangkan ketidakpuasan. Dengan ketidakpuasan itu sudah semakin tidak ada, semakin hilang, kita berharap maka akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua. Itu saya kira harapan dari pemerintah pusat,” pungkasi Wapres. ● han



FOTO: ANT

## MARINIR GELAR LATIHAN OPERASI PERTEMPURAN KOTA

Prajurit Korps Marinir TNI AL menaiki kendaraan taktis dalam Latihan Operasi Pertempuran Kota Korps Marinir Tahun 2021 di Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (6/11). Latihan tersebut digelar untuk memelihara dan meningkatkan disiplin serta kemampuan teknis dan taktis bertempur prajurit sebagai bentuk loyalitas TNI AL terhadap bangsa dan Negara.

## Lindungi Hak Konstitusi Masyarakat, MK Kerap Minta DPR Merevisi UU

**JAKARTA (IM)** - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan putusan MK kerap meminta DPR merevisi sebuah UU. Meski hal itu tak diatur secara tegas dalam hukum acara MK, namun hal itu terpaksa dilakukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga Indonesia.

“Bahkan ada pula putusan MK yang dalam amarnya menolak, namun pada bagian pertimbangannya memberikan pesan kepada pembentuk UU untuk mengubahnya,” ucap Anwar sebagaimana dikutip dari website MK, Minggu (7/11).

Hal itu disampaikan dalam perseramin Unej Law Integrated Legal Edu dan Pemanfaatan Smartboard Mini Courtroom di Universitas Jember, Sabtu (6/11) kemarin. Di Indonesia, perkembangan hukum acara MK melalui praktik persidangan dan putusan yang dikeluarkan oleh MK. Hal ini telah dilakukan oleh hakim konstitusi pada generasi awal hingga saat ini.

“Perkembangan tentang hukum acara MK melalui praktik dan putusan, sesungguhnya bukan merupakan kehendak MK, melainkan untuk mengisi kekosongan hukum di dalam praktik, dan bahkan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negara,” kata Anwar Usman.

Anwar memberikan contoh saat pertama kali MK berdiri. Terdapat satu norma yang melarang bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji ke MK adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 dilaksanakan (Perubahan UUD 1945 pada 1999-2002).

Ketentuan norma ini tentu berangkat dari suatu prinsip hukum bahwa hukum harus bersifat prospektif dan bukan retroaktif. “Namun, ketentuan norma ini bertentangan dengan semangat dibentuknya MK yaitu untuk memberikan perlindungan hak konstitusional kepada warga negara dari berlakunya suatu UU yang bertentangan dengan UUD,” ujar Anwar.

Padahal, UU yang lahir sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945 tidak tertutup kemungkinan juga melanggar hak konstitusional warga negara.

“Jika keberlakuan norma ini tetap ada, tentu saja dalam hukum acara pengujian undang-undang, ketentuan ini menjadi syarat formal bagi Pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang. Oleh karena itu, sejak 2004

norma ketentuan pasal ini telah dibatalkan oleh MK, melalui Putusan Nomor 066/PUU-II/2004,” tegas Anwar.

Hal lain yang cukup penting dalam proses hukum acara pengujian undang-undang (PUU) di MK adalah menyangkut kedudukan hukum Pemohon. Meski Pasal 51 UU MK telah diatur siapa saja pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara PUU, namun perkembangan syarat konstitusional bagi Pemohon berkembang dalam Putusan-Putusan MK.

“Sejak 2004 MK telah mengembangkan syarat konstitusional Pemohon tersebut, sebagai terjemahan dari Pasal 51 UU MK,” ucap Anwar. ● me

Setidaknya, ada tiga yurisprudensi MK yang menjadi sumber rujukan bagi putusan menyangkut syarat konstitusional bagi Pemohon. Yaitu Putusan 003/PUU-I/2003, Putusan 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Begitu pula halnya terhadap format putusan MK. Meski UU MK hanya mengatur tiga varian bentuk amar putusan MK, yakni tidak dapat diterima, ditolak, dan dikabulkan. “Namun dalam perkembangannya terdapat putusan MK yang bersifat bersyarat, yakni putusan conditionally constitutional dan conditionally unconstitutional,” beber Anwar.

“Bahkan ada pula Putusan MK yang dalam amarnya menolak, namun pada bagian pertimbangannya memberikan pesan kepada pembentuk UU untuk untuk mengubahnya. Juga masih banyak varian lain dalam hukum acara PUU lainnya yang merupakan perkembangan dari Putusan MK. Termasuk Hukum Acara MK tentang PUU yang baru, sebagaimana diatur di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021,” Anwar menegaskan.

Untuk diketahui, beberapa putusan MK yang meminta DPR merevisi UU adalah batas usia pernikahan dalam UU Perkawinan. Dalam putusan yang diketok pada 2018, MK menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inkonstitusional. MK memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan paling lama 3 tahun sejak hari ini. “Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, melakukan perubahan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi anak,” ujar Ketua MK Anwar Usman. ● han

## Empat Orang Tewas Akibat Tabrakan Beruntun di Sumedang

**SUMEDANG (IM)** - Empat orang tewas akibat tabrakan beruntun di Tanjakan Sanur, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Minggu (7/11).

Kecelakaan tersebut melibatkan satu tronton bermuatan batu bara bernomor polisi D-9597-AE, Pajero Sport B-1260-SJO, Daihatsu Uga Z-1256-AS, Toyota Rush D-1887-VP, dan empat sepeda motor. Personel Satlantas Polres Sumedang masih

melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Iman Rahmat (46), warga sekitar, mengatakan insiden kecelakaan maut itu berlangsung sekitar pukul 07.30 WIB. Sewaktu berada berada di rumah, dia mendengar suara keras benturan kendaraan.

“Pas saya lihat saya udah melihat ada tiga orang tergeletak di badan jalan. Satu orang lainnya berada di pinggir sungai,” kata Iman kepada

wartawan.

Para korban itu terdiri dua perempuan dan dua lelaki. “Saya bantu angkat korban ke kantong mayat. Empat korban meninggal dibawa ambulans ke rumah sakit,” ucap Iman.

Dia menjelaskan empat korban itu merupakan rombongan iring-iringan pernikahan. “Korban rencananya mau mengantar yang nikahan dari Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari,” ujar Iman. ● me

## Warga yang Berolahraga Disekitar Bundaran HI Diminta Patuhi Prokes

**JAKARTA (IM)** - Petugas Dit Lantas Polda Metro Jaya bersama Satpol PP DKI Jakarta meminta masyarakat

yang berolahraga di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), Minggu (7/11) pagi.

Berdasarkan unggahan @TMCPOldmetro terlihat sudah banyak warga berolahraga di kawasan Bundaran HI. Ada yang berlari ataupun menggunakan sepeda. Di sana terlihat juga sejumlah petugas yang bersedia mengawasi apakah warga yang berolahraga terbit menerapkan prokes.

“Polri Dit Lantas PMJ melakukan pengamanan dan imbauan Prokes 5M kepada masyarakat yang berolahraga di sekitaran Bundaran HI Menteng Jakpus,” tulis akun @

tmcoldmetro dalam keterangan unggahan, Minggu (7/11).

Sementara, pada unggahan @satpolpp.dki beberapa petugas yang memberikan teguran. Adapun teguran diberikan kepada mereka yang berolahraga sambil menu-runkan maskernya.

“Dimohon untuk tetap disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, tidak beraktivitas berkerumun di fasilitas umum dan saling menjaga ketertiban umum,” tulis @satpolpp.dki.

“Jangan abai, pandemi belum usai.”

Seperti diketahui, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta turun menjadi Level 1. Hal ini sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1312 Tahun 2021 tentang PPKM Level 1

Corona Virus Disease 2019 yang berlaku selama 14 hari terhitung 2-15 November 2021.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengapresiasi kinerja semua pihak yang telah berkolaborasi bersama menangani pandemi Covid-19. Ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang terus menjaga protokol kesehatan. “Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Hal ini tidak lepas dari kerja kolosal kita bersama. Khususnya saya mengapresiasi kepala tim tracer dan vaksinasi di DKI yang terus bekerja keras memastikan pandemi tetap terkendali di Jakarta, sehingga bisa mencapai Level 1. Juga masyarakat yang terus disiplin menjaga prokes,” ungkap Anies di Balai Kota, Rabu (3/11). ● mar



IDN/ANT

## VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA CAPAI 200 JUTA SUNTIKAN

Warga antre untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Sentra Vaksinasi COVID-19 di Gelanggang Remaja Pulogadung, Jakarta, Sabtu (6/11). Menurut data Satgas COVID-19, per tanggal 5 November 2021 pukul 12.00 WIB, Indonesia mencatat 204.913.735 suntikan dosis vaksin COVID-19 dengan rincian 123.824.199 suntikan dosis pertama, 77.687.838 suntikan kedua, serta 1.156.371 suntikan ketiga bagi tenaga kesehatan.

## 6 Tahun Buron, Pacar Bandar Narkoba Ditangkap di Surabaya

**DENPASAR (IM)** - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap Nana Juhariyah (28 tahun), terpidana kasus narkotika dan pencucian uang. Nana merupakan kekasih bandar narkoba asal Bali yang kini mendekam di Nusa Kambangan. Nana ditangkap di Surabaya setelah menjadi buronan selama enam tahun.

“Dia ditangkap lalu dibawa ke Bali dan kami eksekusi ke Lapas Kerobokan,” kata Kasi Penkum Kejati Bali A Luga Harlianto, Minggu (7/11).

Dia menjelaskan, Nana menjadi terdakwa kasus nar-

kotika 404 gram sabu bersama pacarnya, Hendra Kurniawan pada 2014 silam. Hendra telah divonis 15 tahun dan saat ini mendekam di Lapas Nusa Kambangan.

Sedangkan Nana ketika itu divonis bebas. Dari kasasi yang diajukan jaks, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis tiga tahun dan denda Rp500 juta, 3 Juni 2015 silam. Menurut Luga, Nana termasuk licin karena selalu berpindah tempat. “Hingga akhirnya belakangan ini dia terendus di Surabaya dan kita tangkap di sebuah apartemen,” ujarnya. ● han

## Labuhan Bajo Harus Siap Terima Kedatangan Turis dengan Prokes

**JAKARTA (IM)** – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Labuhan Bajo sebagai destinasi wisata prioritas sudah harus bersiap menerima kedatangan turis dengan tetap menjaga akselerasi vaksinasi dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan (prokes).

Jika seluruh elemen masyarakat sudah mendapat vaksinasi dan patuh menjalankan prokes 3M, yakni disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, serta selalu menjaga jarak jika bertemu seseorang, maka penyebaran virus Corona dapat ditekan. Wisatawan pun akan merasa nyaman saat berada di Labuhan Bajo.

Listyo mengatakan semua langkah itu dapat dilakukan dengan kerja sama antara pema, TNI/Polri, serta para tokoh lintas agama dan masyarakat.

“Kalau menjaga pengendalian angka Covid-19 dan ada kegiatan event internasional, kita yakin selanjutnya ini berdampak pertumbuhan ekonomi bisa kita pulihkan,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia dapat menunjukkan kepada masyarakat internasional sebagai destinasi wisata yang aman dari sisi fasilitas, masyarakat, kesiapan, dan keramahan. “Ini terjadi apabila penanganan Covid-19 baik, kamtib-

mas kondusif, dan masyarakat yang baik menerima sehingga kita bisa menjadikan NTT, khususnya Labuhan Bajo, siap menyambut wisatawan internasional dan domestik,” kata Listyo saat meninjau vaksinasi Covid-19 bersama Panglima TNI Marsyal Hadi Tjahjanto di Labuhan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu (6/11).

Listyo menyatakan hingga saat ini masih ada masyarakat yang enggan divaksinasi Covid-19 karena terpengaruh hoaks.

“Kami sudah berkeliling, ada di beberapa tempat yang sampai saat ini sangat sulit melaksanakan vaksinasi karena muncul hoaks dan muncul isu vaksin itu bertentangan dengan kaidah agama,” kata Sigit.

“Oleh karena itu, perlu ada penjelasan cukup panjang, bahkan sampai sekarang hal tersebut masih kita hadapi,” ujar Listyo menambahkan.

Kendati demikian, Listyo mengapresiasi peran serta tokoh lintas agama Labuhan Bajo mendukung percepatan vaksinasi Covid-19. Ia menyebutkan peran serta tokoh lintas agama membantu mewujudkan NTT menjadi wilayah destinasi superprioritas dan mengangkut pertumbuhan ekonomi wilayah setempat. ● mar